



## PENERAPAN *PUBLIC VALUE* PADA PENDIRIAN PANTI ASUHAN DARUL QOLBI DENGAN BASIS MODAL SOSIAL DI SLEMAN

## APPLICATION OF PUBLIC VALUE IN THE ESTABLISHMENT OF DARUL QOLBI ORPHANAGE BASED ON SOCIAL CAPITAL IN SLEMAN

Ahmad Nur Alamsyah<sup>1</sup>, Francisca Winarni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article history:

Diterima 26-02-24

Diperbaiki 29-02-24

Disetujui 04-03-24

#### Kata Kunci:

*Public Value*, Modal Sosial, Panti Asuhan, *Strategic Triangle*, Anak Telantar

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami *public value* pada pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi berbasis modal sosial di Kabupaten Sleman. Selama ini, *public value* dipandang hanya mampu dikoordinir oleh pemerintah, namun kenyataannya *public value* dapat dikoordinir oleh siapapun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data menggunakan tiga metode, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Informan yang dipilih merupakan orang-orang yang terlibat dalam proses pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber. Data kemudian dianalisis melalui reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi telah mampu mengkoordinir *public value*. Terdapat tiga *public value* yang muncul, yaitu *welfare value* ditunjukkan dengan dinamika kesejahteraan anak telantar; *social value* ditunjukkan dengan gotong royong masyarakat untuk panti asuhan, dan *political value* ditunjukkan dengan proses lobi-melobi panti asuhan dengan pemerintah. Nilai yang dituju dari pendirian panti asuhan berupaya untuk menyejahterakan anak-anak telantar. Kapabilitas operasional panti asuhan disokong dengan basis modal sosial meliputi jaringan, kepercayaan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Legitimasi dan dukungan didapatkan dari masyarakat serta pemerintah setempat baik secara fisik maupun non fisik. Kajian ini sebagai rujukan pentingnya *public value* dalam kebijakan publik oleh pemerintah.

### ABSTRACT

This research aims to find out the process of public value application on the establishment of Darul Qolbi Orphanage based on social capital in Sleman Regency. To date, public value viewed as being able to only coordinated by the government. However, several researches concluded that public value can be coordinated by anyone.

This research uses a qualitative descriptive approach. Data collection used three methods, which are observation, documentation, and interviews. The informants chosen were people involved in the process on the establishment of Darul Qolbi Orphanage. Data validity in this research was carried out by triangulating sources. The data was analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The research results show that the establishment of Darul Qolbi Orphanage has been able to coordinated public value. There are three identified public values that are manifested: welfare value is shown by the dynamics of the welfare of orphans; social value is shown by the community's mutual cooperation for the orphanage; and political value is shown by the orphanage's lobbying process with the government. The operational capability is supported by the social capital base includes networks, trust and norms in the community. Legitimacy and support are obtained from the community and local government. This study is a reference to the importance of public value in public policy by the government.

#### Keywords:

Public value, Social Capital, Orphanage, Strategic Triangle, Orphans

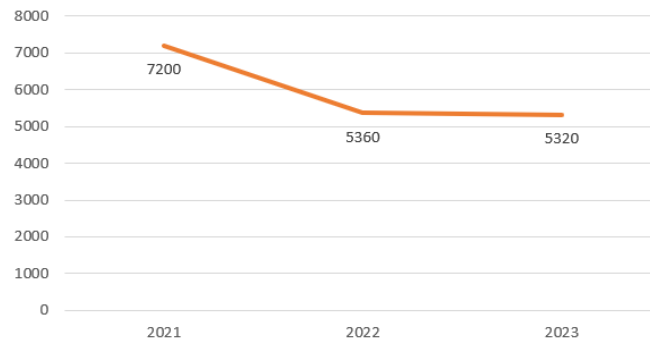
## 1. Pendahuluan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Indonesia, menunjukkan terdapat 67.368 anak terlantar per 15 Desember 2020. Merujuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar, anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial. Anak dapat dikategorikan sebagai anak terlantar apabila orangtua mereka melalaikan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hak dasar anak secara wajar. Faktor ketelantaran anak dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, tingkat pendidikan orang tua, serta keadaan lingkungan masyarakat sekitar (Hardiati, 2010). Kemiskinan menjadi faktor signifikan terjadinya ketelantaran anak. Kondisi tersebut membuat orang tua kesulitan untuk memberikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anaknya. Selain itu, anak yang lahir dari keluarga prasejahtera beresiko mengalami *stunting* karena tidak terpenuhinya asupan gizi sesuai kebutuhan. Dampaknya, anak akan tumbuh dengan potensi yang tidak optimal sehingga berpengaruh kepada tingkat kecerdasan intelektual dan emosional.

Kemiskinan berkaitan dengan anak terlantar, semakin tinggi tingkat kemiskinan dapat menjadi indikator bertambahnya anak-anak terlantar (Sukadi, 2013). Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi lebih beresiko terdapat jumlah anak terlantar lebih banyak dibandingkan wilayah dengan kemiskinan rendah. Salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data dari Bappenas pada tahun 2023, DIY termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berkisar 10,85—11,2 berdasarkan target pembangunan nasional (Muhamad, 2023).

Pada tahun 2021, berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, jumlah anak terlantar di wilayah Provinsi DIY berkisar 7.902 anak. Pada tahun tersebut terjadi lonjakan jumlah anak terlantar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19. Pandemi tersebut menyebabkan tingkat kemiskinan naik sehingga jumlah anak-anak terlantar juga ikut bertambah. Pada dua tahun berikutnya rentang 2022—2023 jumlah anak terlantar berangsur menurun. Salah satu daerah yang memiliki jumlah anak terlantar terbanyak di DIY adalah Kabupaten Sleman. Pada rentang tahun 2021—2023, jumlah anak terlantar di Sleman rata-rata berkisar 900 hingga 1000 anak.

Anak-anak terlantar yang berada di Kabupaten Sleman tidak sepenuhnya warga asli Sleman. Anak terlantar tersebut berasal dari kalangan anak jalanan yang datang ke wilayah Sleman. Anak-anak jalanan yang hidup menggelandang di jalan termasuk ke dalam kategori anak terlantar (Laksana & Irawan, 2021). Dinas Sosial Sleman sejak tahun 2015 mendata bahwa anak jalanan yang tersebar di Sleman rata-rata berasal dari luar wilayah Sleman (Taking, 2020). Anak-anak yang hidup di jalanan diakibatkan oleh kondisi keluarga *brokenhome* atau mengalami kemiskinan sehingga terpaksa hidup di jalanan (Astri, 2014).



Gambar 1 Data jumlah anak telantar rentang tahun 2021—2023

Sumber: Dinas Sosial DIY

Lonjakan anak telantar di wilayah Kabupaten Sleman membuat kuwalahan pihak Dinas Sosial Sleman. Pemerintah kesulitan untuk bertindak secara cepat dalam menangani anak telantar karena datanya yang belum *real time* (Mutiarra, 2020). Permasalahan data terjadi karena belum adanya integrasi data satu pintu yang menghubungkan antar lembaga. Hal tersebut menyebabkan antar lembaga memiliki jumlah data yang berbeda. Meskipun, perbedaan angka tidak terlalu signifikan, namun hal tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menangani anak telantar.

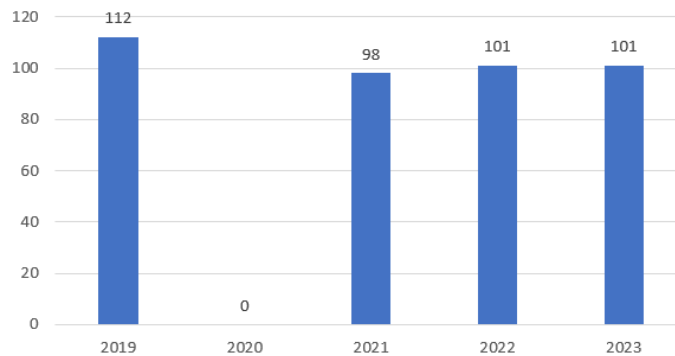
Kepengurusan anak telantar berada di bawah wewenang lembaga pemerintah yang menangani permasalahan sosial di masyarakat. Lembaga yang berwenang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial di masing-masing daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Anak-anak telantar, khususnya anak jalanan yang sudah terdata, akan diberikan assessmen untuk menentukan layanan lanjutan di lembaga sosial (Dinsos DIY, 2021). Anak-anak yang membutuhkan layanan pengasuhan lanjutan akan dirujuk ke panti rehabilitasi sosial anak yang dimiliki oleh Dinas Sosial provinsi. Pemerintah DIY memiliki panti rehabilitasi sosial anak yang bernama Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA).

Sub-Koordinasi Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Sleman, Wahyudin Hadi, menjelaskan balai rehabilitasi hanya dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki panti sosial sejenis. Keterbatasan tersebut menyebabkan pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menjangkau keseluruhan anak telantar di wilayahnya, termasuk di Kabupaten Sleman sendiri.

Permasalahan anak telantar menjadi isu yang sangat krusial sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak di luar pemerintah. Kerja sama yang muncul antara pihak swasta dengan pihak pemerintah yang terjalin dalam “kemitraan publik-swasta” merupakan bentuk keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Verschuere dkk, 2012). Kolaborasi tersebut sebagai kesanggupan antar organisasi dalam membagi informasi, kegiatan, kapabilitas, dan sumber daya dalam mencapai tujuan akibat dari ketidakmampuan organisasi dalam aktualisasi dirinya (Bryson dkk, 2006). Anak telantar yang berada di wilayah Sleman akan dinaungi oleh panti-panti asuhan yang telah bermitra dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mampu untuk menampung seluruh anak

telantar karena keterbatasan tempat dan sumber daya manusia yang dapat mengurus anak-anak tersebut.

Selama lima tahun terakhir, kurang lebih terdapat 100 panti asuhan yang tersebar di seluruh wilayah Sleman. Panti-panti asuhan ini yang membantu kerja Dinas Sosial Sleman dalam permasalahan anak telantar. Meskipun, pada tahun 2021 terdapat beberapa panti asuhan yang tutup karena akibat pandemi Covid-19. Namun, pada tahun berikutnya, berdiri panti asuhan baru hingga pada tahun 2023 tercatat terdapat 101 panti asuhan. Panti asuhan di Sleman didirikan oleh yayasan amal atau pun didirikan secara swadaya oleh masyarakat.



Gambar 2 Data jumlah panti asuhan di Wilayah Sleman

Sumber: Arsip Dinas Sosial Sleman

Modal sosial adalah ciri dari kehidupan sosial yang berdasarkan pada norma, jaringan, dan *trust* yang melekat pada anggota masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk bergerak bersama secara efektif dalam mengejar tujuan (Putnam, 1993). Panti asuhan yang dikelola secara kolektif dapat dipandang menggunakan konsep modal sosial. Kasus ketelantaran anak yang tidak dapat diatasi segera oleh pemerintah memunculkan rasa empati di sebagian kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini kemudian menampung anak-anak telantar dengan mendirikan panti asuhan secara swadaya. Pengelolaan secara swadaya menjadi salah satu ciri digunakannya konsep modal sosial dengan gotong royong dari masyarakat. Gotong royong menjadi cerminan kekuatan kolektif dalam mencapai tujuan.

Salah satu panti asuhan yang didirikan secara swadaya adalah panti asuhan Darul Qolbi. Panti asuhan ini terletak di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Panti asuhan ini didirikan oleh seorang preman pensiun bernama Prianggono yang akrab disapa Mas Pri. Mas Pri mendirikan panti asuhan ini secara swadaya bersama istrinya pada tahun 2013. Keprihatinannya melihat anak-anak terlantar di lingkungannya membuatnya tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Banyak diantara anak-anak yang diasuhnya lahir dari keluarga miskin dan beberapa diantaranya ditelantarkan orang tuanya karena *brokenhome* atau anak yang tidak diinginkan.

Panti asuhan Darul Qolbi menjadi cerminan masyarakat dapat turut andil menangani permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Panti asuhan tersebut saat ini belum berstatus mitra pemerintah sehingga seluruh operasionalnya masih ditanggung secara swadaya. Operasional panti asuhan disokong gotong royong oleh

warga sekitar. Selain warga sekitar, masyarakat umum juga berperan sebagai donatur panti tersebut. Aktivitas yang dilakukan kolektif tersebut, secara tidak langsung memunculkan konsep *public value*.

*Public value* selama ini hanya dipandang diciptakan dan dikoordinir oleh pemerintah, tetapi sebenarnya *public value* dapat dikoordinir oleh siapa pun dengan latar belakang apapun. Nilai publik justru tercipta dan bertumbuh bersama masyarakat, sesuai dengan pendapat Jorgensen & Rutgers (2014) “*Public value is rooted, ultimately, in society and culture, in individuals and groups, and not just in government*”. Penerapan *public value* tidak terbatas oleh pemerintah saja, penerapan oleh masyarakat dapat disebut sebagai bentuk “ruang demokrasi” (Bennington, 2011). Namun, Riset mengenai *public value* masih berpatron bahwa nilai tersebut hanya dipandang dari sisi pemerintah.

Beberapa penelitian yang mengangkat tema *public value* pada sudut pandang masyarakat dilakukan oleh Rahayusmara (2019). Penelitian ini menekankan pada proses dinamika yang muncul karena *public value* tercipta dari adanya bank sampah. Aspek yang dilihat dari penelitian ini adalah metode kepemimpinan dan *capacity building* dalam bank sampah. Namun, dalam penelitian tersebut belum menjelaskan proses munculnya *public value* dapat tercipta dari adanya bank sampah. Kemudian, penelitian lain pernah dilakukan oleh Pratama (2021). Penelitian ini menekankan pada proses terciptanya *public value* pada fenomena *lockdown* mandiri. Fenomena tersebut telah berhasil menciptakan nilai publik bagi masyarakat, yaitu tentang rasa aman dari penularan Covid-19. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kolektif yang dilakukan masyarakat dapat dikaji menggunakan konsep *public value*. Hal ini sejalan dengan kegiatan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat Desa Widodomartani, yaitu dalam hal mendirikan panti asuhan.

Masyarakat yang turut andil dalam pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi secara tidak sadar telah menerapkan *public value*. *Public value* yang dituju berkenaan dengan kesejahteraan sosial, pada konteks ini sasarannya adalah kesejahteraan anak-anak yang telantar. Panti Asuhan Darul Qolbi dengan keterbatasan sumber daya materiil sehingga menerapkan basis modal sosial, tetap mampu untuk dapat mengkoordinir suatu nilai publik. Penerapan *public value* oleh masyarakat penting untuk dikaji. Penerapan tersebut memperluas ruang demokrasi bagi masyarakat untuk dapat berperan dalam penanganan masalah.

Riset yang berkembang dalam penanganan anak telantar dengan menerapkan *public value* masih dipandang dari sisi pemerintah. Seperti penelitian oleh Pakarti (2018) tentang nilai publik dalam kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian tersebut melihat sisi penerapan nilai publik yang dikoordinir dalam kebijakan lembaga pemerintah. Kemudian penelitian oleh Putri (2023) tentang pelayanan penanganan anak telantar oleh Dinas Sosial Kota Jambi melalui *new public service* dengan penerapan kepentingan dan nilai-nilai publik. Penelitian tersebut melihat sisi penerapan penanganan anak telantar hanya dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Jambi. Sedangkan, penelitian ini akan membahas penanganan anak telantar dari sisi masyarakat menerapkan *public value* yang belum dibahas di dua penelitian tersebut.

Penelitian ini akan mengulas peran masyarakat dalam menangani permasalahan anak telantar yang terjadi di lingkungannya. Menjelaskan peranan nilai yang dimiliki oleh masyarakat digunakan sebagai pemecahan masalah. Pada penelitian ini, permasalahan yang terjadi mengenai kesejahteraan anak telantar. Penelitian ini memberikan rujukan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan *bargaining power* dari masyarakat.

*Public value* dalam pendirian panti asuhan Darul Qolbi akan dianalisis menggunakan *strategic triangle* dalam mengkoordinir nilai publik dengan teori milik Moore (2003). *Strategic triangle* Moore digunakan karena mampu memberikan gambaran keberlanjutan dari *public value* dalam tiga unsur yakni legitimasi dan dukungan; nilai yang akan dituju; dan kapabilitas operasional. Legitimasi dan dukungan dilihat dari perspektif pemerintah dan masyarakat setempat. Nilai yang dituju dilihat dari proses kegiatan yang dilakukan. Kemudian, kapabilitas operasional dilihat dari kemampuan panti asuhan dalam menjaga sustainabilitas operasional panti.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian menampilkan hal-hal yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Secara garis besar metode penelitian memaparkan penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian apakah penelitian merupakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bagian ini juga memuat informasi mengenai deskripsi objek dan sample yang digunakan (responden/ profil kasus), metode pengumpulan data, ukuran sampel, dan metode analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. pendekatan studi kasus, yaitu pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu (Bogdan & Biklen, 1982). Studi Kasus terbatas pada wilayah yang sempit (mikro), karena mengkaji perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga dan organisasi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Widodomartani, Kelurahan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa tersebutlah tempat didirikannya panti asuhan Darul Qolbi. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2023 hingga Desember 2023. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* merupakan teknik dalam menentukan subjek penelitian melalui kriteria dan pertimbangan yang bertujuan dalam menjawab rumusan masalah secara rinci (Sugiyono, 2017). Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Prianggono selaku inisiator sekaligus pendiri dari Panti Asuhan Darul Qolbi, tempat pengasuhan bagi anak-anak telantar di wilayah Sleman.

- b. Perwakilan dua Bidang Dinas Sosial Kabupaten Sleman selaku lembaga pemerintah yang berwenang dan memiliki tanggungjawab dalam masalah anak telantar. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial diwakili oleh Wahyudin Hadi dan Kirana Rilla Pratama. Kemudian, Bidang Rehabilitasi Sosial diwakili oleh Gunadi.
- c. Salah satu warga Desa Widodomartani yang ikut membantu dalam menjalankan operasional Panti Asuhan Darul Qolbi.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang telah terkumpul masing-masing akan dianalisis dengan tiga tahap analisis data, yaitu reduksi, *display*, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber.

### 3. Hasil dan Pembahasan

*Public value* berfungsi sebagai sumber daya publik dalam proyek-proyek publik yang menjadi input sebelum kebijakan publik diimplementasikan (Moore, 1995). *Public value* merupakan suatu nilai yang harus dipahami oleh para pejabat karena sebagai bentuk indikator kinerja dan citra organisasi publik dimata masyarakat. Pada awal kemunculannya, *public value* dipandang hanya diciptakan oleh manajer publik, namun paradigma yang berkembang seiring perkembangan *new public service* menjelaskan hal yang berbeda yakni *public value* dapat diciptakan oleh siapa saja karena sifatnya yang dinamis, memperbesar *public sphere* dalam proses penerapannya.

Penerapan *public value* dilandaskan pada konsep *strategic triangle* meliputi nilai yang dituju, kapabilitas operasional, serta legitimasi dan dukungan. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan, proses penerapan *public value* ditunjukkan pada kehadiran Panti Asuhan Darul Qolbi yang bergerak pada sektor kesejahteraan sosial. Terdapat tiga nilai publik yang dihasilkan oleh Panti Asuhan Darul Qolbi, yaitu nilai kesejahteraan, nilai politik, dan nilai sosial. Berikut pembahasan penerapan *public value* pada pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi dengan basis modal sosial di Sleman.

#### 3.1. Nilai yang dituju

Komponen pertama dalam *strategic triangles* yaitu mengenai nilai publik yang dituju, Moore (1995) menitikberatkan nilai yang dituju harus memiliki *strategi goals* untuk membangun strategi yang memiliki substansi. Komponen ini terpusat pada pertanyaan kunci; organisasi ini ingin menghasilkan *value* seperti apa. Bila dalam sektor privat nilai yang ingin dihasilkan berupa laba, namun pada sektor publik nilai yang ingin dihasilkan mengarah kepada tujuan-tujuan sosial. Dalam penerapan *public value* Panti Asuhan Darul Qolbi dilandaskan pada nilai-nilai dalam masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan anak-anak telantar. Dua pijakan nilai dalam menciptakan *public value* panti asuhan ini, yaitu nilai agama dan nilai hukum.

Nilai agama menjadi landasan utama terkait pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi. Nilai agama yang diambil dari agama Islam sesuai dengan agama yang

dianut oleh inisiator pendiri panti asuhan. Pendiri panti asuhan mencatat pada hadis dan Al-Qur'an, bahwasanya setiap muslim diwajibkan untuk menyantuni sesama manusia yang membutuhkan, terutama kepada anak-anak yatim. Proses ide untuk mendirikan panti asuhan dengan nama Darul Qolbi dengan pertimbangan ayat dari surat Al-Isra dan Al-Baqarah. Meskipun berlandaskan pada asas ajaran agama Islam, Prianggono menegaskan jika Panti Asuhan Darul Qolbi terbuka untuk semua kalangan yang membutuhkan.

Nilai kedua yang menjadi pijakan pendirian panti asuhan adalah nilai hukum. Nilai hukum merujuk kepada UUD Negara Republik Indonesia 1945, tepatnya pada pasal 34 ayat 1 dengan bunyi "Fakir Miskin dan Anak-anak telantar dipelihara oleh Negara". Pasal tersebut menjadi rujukan hukum formal yang berlaku di Indonesia yang menjelaskan secara eksplisit bahwa negara harus hadir untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar yang berada di wilayah Indonesia. Negara diwakili oleh pihak penyelenggara pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan bagi warga Indonesia, namun Prianggono tidak mengartikan kehadiran negara hanya pihak pemerintah saja yang dapat turun tangan. Rakyat juga bagian dari negara sehingga dapat ikut berkontribusi membantu sesama yang membutuhkan tanpa harus menunggu pemerintah.

Permasalahan anak telantar menjadi masalah yang krusial karena menyangkut generasi penerus bangsa. Prianggono menilai pemerintah memiliki keterbatasan jika harus bergerak dan mengurus semuanya sendiri, meski pemerintah memiliki kewajiban yang lebih untuk menangani permasalahan anak telantar, Prianggono menganggap tetap perlu adanya peran aktif oleh masyarakat untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Atas dasar empati dan simpati, Prianggono mengisi celah tersebut dengan mendirikan Panti Asuhan Darul Qolbi.

Nilai atau *value* yang dituju dalam pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi berlandaskan pada *basic needs* masyarakat yang berimplikasi kepada kesejahteraan seperti *welfare value*, *political value*, dan *social value*. Meskipun pada awal pendiriannya, tujuan awal dari panti asuhan lebih mengarah kepada *welfare value* untuk menangani permasalahan anak telantar. Namun, selama perjalanannya ternyata muncul nilai-nilai yang tidak direncanakan sebelumnya seperti nilai politik dan nilai sosial.

*Welfare value* mengacu pada definisi kesejahteraan anak pada UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berbunyi "Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Berdasarkan definisi tersebut, proses pemberdayaan dan pengembangan anak panti mengedepankan aspek kebutuhan rohani, jasmani, serta sosial dengan cara memberikan pendidikan formal dan non-formal.

Proses pemberian pendidikan formal tidak dilakukan sendiri oleh pihak panti asuhan. Anak-anak panti akan disekolahkan di sekolah sekitar panti sesuai dengan jenjang usianya. Penghuni panti asuhan saat peneliti berkunjung didominasi anak-anak berusia berkisar 8-10 tahun. Pada usia memasuki 16-17 tahun, anak-anak akan diberikan pilihan untuk melanjutkan di SMA atau SMK. Mayoritas memilih untuk bersekolah di SMK karena ingin langsung bekerja selepas lulus dari sekolah.



Pendidikan non-formal diselenggarakan oleh pihak panti asuhan sendiri yakni kegiatan bimbingan rohani dan kewirausahaan. Pada kegiatan rohani, anak panti diberikan pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Saat ini memang seluruh anak panti beragama Islam sewaktu peneliti melakukan observasi, kegiatan kerohanian meliputi mengaji Al-Quran dan belajar kitab. Kegiatan kerohanian di panti asuhan didampingi oleh enam orang ustadz. Bapak Prianggono sendiri mengaku bahwa jika belum mampu untuk mengajar agama sendiri sehingga mendatangkan tenaga bantuan dari luar.

Kemudian, kewirausahaan anak-anak panti berupa kegiatan bertani, beternak, dan berdagang. Setiap anak panti dapat merasakan ketiga kegiatan tersebut, lalu dapat menentukan bidang mana yang cocok untuk dirinya. Anak-anak panti mulai diberikan pelatihan kewirausahaan ketika sudah memasuki usia remaja atau berkisar SMP. Pada kegiatan pertanian diberikan pelatihan mengenai menanam cabai, semangka, dan padi, namun saat ini kegiatan pertanian yang berjalan hanya tanaman cabai saja. Prianggono menjelaskan saat ini untuk pertanian sedang proses menentukan tanaman yang lebih mudah ditanam dan dipelajari oleh anak-anak yang tentunya juga memperhatikan akses pasar untuk penjualan hasil panen.

Pada peternakan, terdapat dua jenis hewan yang dirawat, yaitu ayam dan kambing. Jenis hewan yang tersedia sepanjang tahun adalah ayam karena dimanfaatkan juga sebagai petelur, sedangkan untuk kambing hanya apabila mendekati bulan Idul Adha saja. Kemudian, kegiatan berdagang ditunjukkan dengan hadirnya warung kopi untuk nongkrong dengan nama Kongsu (Nongkrong Karo Nyusu). Tetapi, saat ini Kongsu sedang ditutup sementara dengan alasan terlalu ramai dan membuat anak-anak lelah untuk mengelolanya.

Anak-anak panti asuhan yang telah lulus dari panti rata-rata dan sudah mampu untuk menghidupi dirinya secara mandiri, beberapa diantaranya memilih untuk membuka usaha serta menerapkan ilmu yang didapat selama tinggal di panti asuhan. Sebagian lainnya yang lulus dari sekolah kejuruan memilih untuk melamar kerja sesuai dengan bidangnya. Bagi anak-anak panti yang membuka usaha sendiri, Prianggono dengan tangan terbuka akan membantu untuk mencarikan modalnya. Selain itu, anak-anak panti yang sudah lulus juga ada yang kembali ke panti asuhan. Prianggono menjelaskan, banyak anak panti lulusan Darul Qolbi yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri, kemudian menyumbang dana untuk operasional ke panti asuhan tempat mereka dulu tinggal. Mereka tidak lupa dengan jasa yang sudah diberikan oleh Panti Asuhan Darul Qolbi.

Loyalitas anak-anak panti yang telah lulus menunjukkan bahwa ada dinamika kesejahteraan yang dialami oleh anak-anak panti setelah lulus. Anak-anak yang sudah dibekali pendidikan dan mampu untuk menghidupi dirinya diharapkan dapat keluar dari garis kemiskinan serta dapat hidup layak sejahtera. Keterjaminan kesejahteraan anak-anak panti selama di panti asuhan juga terdapat andil warga yang bergotong royong.

Nilai sosial dalam pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi, ditunjukkan dengan hadirnya modal sosial dalam pelaksanaannya. Modal sosial yang terbentuk dalam nilai sosial ini, yakni rasa simpati, empati, dan gotong royong, walaupun nilai sosial ini tidak tercipta begitu saja dengan mudah. Melainkan, terdapat hambatan dalam penerapannya karena belum ada rasa kepercayaan dari warga sekitar dengan pendiri

panti asuhan. Stigma yang melekat sebagai mantan preman yang menyebabkan kepercayaan tersebut sulit dicapai.

Seiring berjalannya waktu, kegigihan dari Prianggono dalam menjalankan panti asuhan dapat memupuk kepercayaan dari masyarakat sekitar. Warga mulai ikut membantu bergotong royong, ditunjukkan ketika proses pindah tempat panti asuhan ke wilayah TKD. Proses pindahan tersebut membutuhkan proses pembangunan dari tanah kosong, kemudian didirikan bangunan panti di area tersebut. Selain dari pembangunan bangunan panti, warga juga terlibat pada proses perbaikan jalan menuju akses panti asuhan. Jalan tersebut selain jadi akses menuju panti asuhan juga dapat digunakan sebagai akses jalan umum warga. Pembiayaan perbaikan jalan ini bermodalkan dari biaya swadaya yang dikumpulkan panti asuhan dari para donatur dan warga.

Proses hubungan yang terjalin antara pihak panti dengan para *stakeholder* seperti pemerintah desa setempat dapat menunjukkan terciptanya *political value*. Nilai politik menjadi nilai publik yang tercipta dalam konteks politik. Keberadaan *value* ini dapat dilihat ketika berkaitan dengan persoalan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini juga terjadi pada pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi. Selain dari hubungan pemerintah desa, panti asuhan juga bersinggungan dengan Pemkab yang diwakili oleh Dinsos Sleman untuk mengurus legalitas operasional panti asuhan.

Pada tahun 2019, perizinan telah dilimpahkan ke masing-masing pemerintah kabupaten/kota dari sebelumnya masih menjadi wewenang pemerintah provinsi. Panti Asuhan Darul Qolbi akan ditetapkan sebagai mitra pemerintah apabila telah mengantongi izin operasional yang telah disahkan secara hukum. Panti Asuhan Darul Qolbi saat ini sedang dalam proses mengurus perizinan di tingkat kabupaten. Proses perizinan ini dibantu langsung oleh staf Dinsos Sleman, bidang Kelembagaan Sosial.

Dinsos Sleman menggandeng LKS yang tersebar di seluruh wilayah Sleman guna mempermudah proses penanganan anak telantar. LKS berguna untuk menjangkau jumlah anak telantar yang ada di Kabupaten Sleman. Penjangkauan data anak telantar diambil dari *grassroot*, salah satunya melalui laporan yang diberikan oleh LKS kepada pihak Dinsos Sleman. Selain dari untuk melakukan penjangkauan data, LKS juga berperan untuk menampung anak-anak telantar, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kehadiran LKS ini, termasuk Panti Asuhan Darul Qolbi di wilayah Sleman sangat membantu penanganan permasalahan anak telantar. Penjelasan dari pihak Dinsos Sleman mengenai terbantunya pihak pemerintah dari hadirnya LKS—Salah satunya Darul Qolbi—menunjukkan terciptanya nilai politik. Keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan permasalahan di wilayah Sleman dapat dilihat sebagai bentuk *bargaining power*. *Bargaining power* semakin besar ketika Dinsos sangat membutuhkan panti untuk menampung anak-anak yang terjaring. Dinsos Sleman sendiri tidak memiliki panti penampungan seperti panti anak milik pemerintah provinsi.

Berdasarkan hasil dari pembahasan, nilai publik yang dituju telah berhasil dicapai. Ketercapaian nilai publik dilihat dari luaran kegiatan atau strategi yang digunakan. Selain itu, terdapat dua nilai publik lain yang muncul selain dari nilai publik utama, yaitu nilai politik dan nilai sosial. Dapat dikatakan, pendirian Panti

Asuhan Darul Qolbi di Desa Widodomartani telah berhasil menciptakan tiga nilai publik.

### **3.2. Kapabilitas Operasional**

Pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi dilakukan secara swadaya pada tahun 2013. Semula, sifatnya masih sebagai organisasi informal sehingga belum ada struktur organisasi secara formal, karena dilaksanakan oleh segelintir orang dari kalangan Prianggono. Modal dalam pendirian juga diusahakan secara mandiri dan tidak mencari donatur dengan mengirimkan proposal

Pada awal pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi terdapat hambatan yakni kurangnya dana operasional panti asuhan. Dana awal untuk operasional panti asuhan hanya dikumpulkan dari hasil berjualan soto. Meskipun merasa kekurangan di awal, pendiri panti asuhan sengaja tidak mencari donatur karena memiliki keyakinan bila ada niatan baik, Tuhan pasti akan memberi jalan. Seiring berjalannya waktu, masalah pendanaan dapat diatasi melalui jaringan yang dimiliki oleh pendiri panti asuhan. Selain itu, kepekaan sosial dan rasa empati membuat beberapa warga juga ikut membantu dalam bentuk materiil maupun non-materiil.

Hadirnya masyarakat dalam upaya melancarkan operasional panti asuhan dapat dilihat sebagai indikasi adanya modal sosial. Modal sosial menjadi penunjang kapabilitas operasional panti asuhan. Modal sosial memiliki peran krusial dalam keberlanjutan operasional panti asuhan. Pada konteks penerapan *public value*, modal sosial digunakan apabila terjadi keterbatasan sumber daya materiil untuk melaksanakan operasional. Keterbatasan sumber daya materiil memang menjadi konsekuensi dari pengelolaan panti asuhan yang dilakukan secara swadaya.

Fukuyama (2000) dalam karyanya berjudul "*Social Capital and Civil Society*" menyebutkan terdapat tiga unsur dalam pembentukan modal sosial yakni norma, kepercayaan, dan jaringan. Norma sebagai kesatuan nilai untuk membangun kepercayaan sosial dalam memperbaiki proses kerja sama. Kepercayaan menjadi nilai berharga dalam hubungan masyarakat untuk menjaga jalinan kerja sama membentuk jaringan. Jaringan sebagai wadah dalam komunikasi dan interaksi untuk memperkuat kerja sama.

Unsur pertama pada modal sosial yaitu norma. Norma adalah nilai yang dianut masyarakat sebagai konsepsi untuk menilai benar dan salah tingkah laku individu. Norma berwujud sebagai kesatuan nilai yang ada di masyarakat. Norma berfungsi untuk membangun kepercayaan sosial dalam memperbaiki kerja sama di masyarakat. Pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi, norma yang ditinjau adalah sistem swadaya dan kultur gotong royong masyarakat. Gotong royong sebagai norma kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat pedesaan, berlaku juga di Desa Widodomartani, lokasi dari panti asuhan berdiri.

Gotong royong yang ditunjukkan pada operasional panti asuhan berupa bantuan dari segi materiil maupun non-materiil. Pada segi materiil, bantuan diberikan dalam bentuk pemberian uang untuk operasional panti. Selain sumbangan uang, panti asuhan juga mendapat sumbangan berupa bahan pokok atau makanan untuk asupan anak-anak panti. Kemudian, pada bantuan non-materiil ditunjukkan dengan bantuan tenaga oleh warga. Bantuan tenaga ini terlihat ketika proses pembangunan bangunan panti asuhan yang baru.

Kepercayaan menjadi suatu hal penting dalam modal sosial untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Koordinasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia lebih mudah dilakukan apabila sudah terbentuk kepercayaan. Kepercayaan masyarakat diperlukan sebagai bentuk keberlanjutan eksistensi dari panti asuhan. Adanya kepercayaan membuat masyarakat dapat menerima kehadiran panti asuhan di lingkungan mereka. Tumbuhnya kepercayaan ini membuat masyarakat ikut serta dalam membantu operasional panti asuhan. Dibutuhkan kepercayaan dari seluruh pihak-pihak terkait, terutama pemerintah desa setempat.

Kepercayaan dari pemerintah desa setempat menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan perizinan legal agar panti asuhan dapat melaksanakan kegiatannya. Status tanah yang digunakan oleh panti asuhan di lokasi baru merupakan TKD. Tanpa adanya perizinan jelas dari pemerintah desa, panti asuhan tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut. Perlu adanya izin jelas dalam penggunaan TKD untuk menghindari proses pidana. Pada saat peneliti observasi, beberapa TKD memang disegel oleh pemerintah provinsi karena tidak sesuai penggunaannya. Panti Asuhan Darul Qolbi tidak bermasalah karena peruntukannya sudah sesuai peraturan, yaitu untuk kegiatan sosial.

Unsur ketiga, jaringan sebagai wadah untuk mempersatukan individu yang terpisah. Penggunaan modal sosial tidak dapat dilakukan secara sendiri, perlu adanya pihak lain yang berkontribusi. Pihak lain bergabung apabila memiliki kesamaan gagasan dan tujuan. Persamaan tersebut dapat dijembatani melalui proses pembentukan *networking* atau jaringan ini. Jaringan berperan cukup signifikan terhadap perkembangan panti asuhan.

Jaringan yang terbangun digunakan sebagai komunikasi antara pihak panti asuhan dengan pihak luar, seperti donatur, masyarakat luas, dan pihak yang memiliki informasi tentang anak telantar. Jaringan yang terbentuk berasal dari koneksi yang dibangun oleh pendiri panti asuhan. Koneksi ini terbentuk ketika pendiri panti asuhan pada masa hijrahnya dan bertemu dengan orang-orang baru dengan visi serta misi sama. Selain itu, koneksi juga didapat dari para pasien pengguna jasa hapus tato miliknya. Penyebaran informasi antara pihak panti asuhan dengan jaringan yang dimiliki menggunakan kanal media sosial, yaitu Facebook dan Whatsapp.

Panti Asuhan Darul Qolbi juga memiliki jejaring resmi di bawah naungan Dinsos Sleman, yaitu Forkom LKS se-Kabupaten Sleman. Forkom ini berfungsi sebagai sarana diskusi informasi antar LKS atau pun LKS dengan Dinsos Sleman. Kegiatan dari Forkom berkaitan dengan pertukaran informasi mengenai kendala dan hambatan yang dialami oleh LKS. Hasilnya penyelesaian masalah dapat dibantu oleh LKS atau langsung ditangani oleh Dinsos Sleman apabila di luar kemampuan dari LKS. Selain itu, Forkom ini juga digunakan oleh Dinsos Sleman sebagai media monitoring dan sosialisasi program-program Dinsos Sleman bagi LKS di Sleman.

Adanya jaringan yang dimiliki oleh Panti Asuhan Darul Qolbi, membuat panti asuhan dapat bertahan hingga saat ini. Terhitung sudah 10 tahun panti asuhan berdiri dan sudah meluluskan sekitar 600 anak panti. Jaringan ini lah yang menjaga keberlanjutan dari operasional panti asuhan. Segala kebutuhan materiil maupun non-materiil dapat terpenuhi dari bantuan jaringan yang ada. Terdapat dua inventaris

berharga yang dimiliki oleh Panti Asuhan Darul Qolbi hasil hibah masyarakat, yaitu satu mobil ambulance dan satu mesin penghapus tato.

### 3.3. Legitimasi dan dukungan

Legitimasi dan dukungan menjadi komponen yang harus terpenuhi untuk mendukung keberlanjutan program yang direncanakan oleh inisiator *public value*. Legitimasi dan dukungan dalam konteks Panti Asuhan Darul Qolbi untuk legalitas pendiriannya. Pihak-pihak yang harus dicari legitimasi dan dukungan ialah pemerintah setempat dan masyarakat. Afirmasi dari pemerintah diperlukan untuk mempermudah perizinan yang sah di mata hukum. Sedangkan dari masyarakat untuk mempermudah kegiatan karena panti asuhan berada di tengah-tengah pemukiman penduduk.

Legitimasi dan dukungan dari masyarakat, dilakukan pendekatan oleh pendiri panti asuhan. Pendiri panti asuhan mengajak anak-anak panti untuk dapat berbaur di masyarakat. Pendekatan juga dilakukan dengan mengunjungi RT untuk memohon izin kegiatan panti asuhan. Pada awalnya terdapat hambatan untuk dapat meyakinkan masyarakat terkait berdirinya panti asuhan yakni stigma yang melekat pada pendiri panti asuhan. Lambat laun, pendekatan yang dilakukan membuahkan hasil, masyarakat mulai menerima dan ikut bergotong royong untuk panti asuhan. Hal ini juga didukung oleh pihak RT yang ikut mengkomunikasikan kepada warga.

Pada proses mengurus legitimasi dan dukungan dari pemerintah setempat untuk perizinan Panti Asuhan Darul Qolbi yang sah secara hukum. Pemerintah desa menjadi tingkat pertama yang didekati untuk mencari legitimasi dan dukungan. Perizinan dari pemerintah desa untuk penggunaan TKD sebagai lokasi berdirinya panti asuhan. Perizinan operasional diajukan kepada Pemkab yang diwakili oleh Dinsos Sleman. Bidang yang mengurus perizinan tentang panti asuhan ialah Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial. Proses mengurus izin pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi masih dalam tahap proses di Dinsos Sleman. Prosesnya dibantu langsung oleh staf Dinsos Sleman untuk mendapatkan legalitas yang sah secara hukum.

Proses pencarian legitimasi dan dukungan dari pemerintah, terutama Pemkab terhitung lebih mudah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatasi permasalahan anak telantar sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintah dalam konteks ini Dinsos Sleman memiliki keterbatasan kapabilitas untuk menangani keseluruhan anak telantar di wilayah Sleman. Keterbatasan ini dalam hal anggaran dan SDM yang dimiliki. Maka dari itu, kehadiran panti asuhan swadaya seperti Darul Qolbi sangat membantu bagi Pemkab Sleman.

Pembkab Sleman sendiri masih dalam proses *trial and error* untuk program penanganan anak telantar di Sleman. Program yang sudah ada juga baru dilaksanakan selama dua tahun. Program tersebut masih membutuhkan beberapa perbaikan untuk efektivitas dan efisiensi, terutama dalam penggunaan anggaran. Bagi panti asuhan yang sudah menjadi mitra pemerintah sendiri mendapatkan dana hibah. Namun, keterbatasan anggaran membuat dana hibah tersebut harus bergiliran antar panti asuhan untuk mendapatkannya. Panti Asuhan Darul Qolbi hanya mendapatkan dana hibah satu tahun sekali.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah Bagaimana penerapan *public value* pada pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi dengan basis modal sosial. Dinamika penerapan *public value* dilihat dari adanya kebermanfaatan, pengaruh, serta hasil dari hadirnya panti asuhan tersebut. Kebermanfaatan paling utama dari hadirnya Panti Asuhan Darul Qolbi dengan menerapkan *welfare value* bagi anak telantar adalah terdapat dinamika kesejahteraan penghuni panti yang menuju ke hidup lebih baik. Terdapat dua nilai yang menjadi sumber daya penerapan nilai publik serta menjadi landasan berdirinya panti asuhan yaitu nilai agama dan nilai hukum. Kedua nilai tersebut menghasilkan tiga nilai berupa nilai kesejahteraan, nilai politik, dan nilai sosial. Nilai kesejahteraan ditunjukkan dengan peningkatan taraf kesejahteraan anak-anak penghuni panti yang sebelumnya berstatus sebagai anak telantar. Nilai politik ditunjukkan dalam proses hubungan antara pendiri panti dengan para *stakeholder*. Kemudian, nilai sosial ditunjukkan oleh aksi yang dilakukan masyarakat terhadap proses pendirian panti asuhan. Ketiga nilai yang diterapkan telah mampu dilaksanakan, diinternalisasikan, dan dipahami dalam wujud *output* dari kegiatan atau aktivitas pada pendirian Panti Asuhan Darul Qolbi. Panti Asuhan Darul Qolbi dalam mempertahankan eksistensinya memanfaatkan modal sosial yang berguna dalam kondisi terbatasnya sumber daya materiil. Modal sosial tersebut turut membantu sustainabilitas dalam penerapan nilai publik yang muncul dari berdirinya Panti Asuhan Darul Qolbi. Kemudian, terdapat peran legitimasi dan dukungan dalam proses mempertahankan serta memperluas cakupan *public value* yang telah diterapkan pada panti asuhan. Meskipun pada proses legitimasi dan dukungan terdapat hambatan untuk meraih dari masyarakat, namun pada pemerintah tidak terdapat hambatan dalam meraih legitimasi dan dukungan tersebut. Penelitian ini terbatas pada penilaian penggunaan modal sosial dalam mempertahankan dan menyokong keberlanjutan dari *public value* yang ada.

#### Referensi

- [1] Hardiati E., Evaluasi model Pelayanan Sosial anak terlantar di Dalam Panti, Yogyakarta: B2P3KS Press, 2010.
- [2] Sukadi I, "Tanggung Jawab Negara terhadap anak terlantar Dalam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 5, no. 2, 2013.
- [3] Muhamad Nabila, "databoks.katadata.id," KataData, 14 7 2023. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/14/bappenassebut-kemiskinan-di-16-provinsi-masih-relatif-tinggi-berikut-daftarnya>. . [diakses 15 November 2023].
- [4] Laksamana DF dan Irawan AD, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai korban penelantaran. Binamulia Hukum," *Binamulia Hukum*, vol. 10, no. 2, pp. 107-115, 2021.
- [5] Taking M, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi," *Jurnal Pendidikan Kewaraganaan Dan Hukum*, vol. 9, no. 4, pp. 412-421, 2020.
- [6] Astri H, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol. 5, no. 2, 2014.

- [7] Mutiara P, " Penanganan anak terlantar butuh komitmen," Berita Utama Kemenko PMK, 2020. [Online]. Available: <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuhkomitmen>. [diakses 12 Oktober 2023].
- [8] Dinsos DIY, "Peran dan Fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial," Dinas Sosial , Yogyakarta, 2021.
- [9] "Balai RSPA," Dinas Sosial DIY, 2016. [Online]. Available: <https://dinsos.jogjaprovo.go.id/balai-rspa/>. [diakses 9 Desember 2023].
- [10] Rahayunasmara, Tiara, *DINAMIKA PUBLIC VALUE DALAM MASYARAKAT (STUDI KASUS BANK SAMPAH GEMAH RIPAH BANTUL)*, Skripsi, Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, 2019.
- [10] Pratama, T. A., *Fenomena Lockdown Mandiri: Penciptaan Public Value Berbasis Modal Sosial Sebagai Langkah Pencegahan Penularan COVID-19 oleh Masyarakat Padukuhan-Padukuhan di Pakem, DIY*, Skripsi, Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- [11] Pakarti, D. B., *Public Values Kebijakan Dinas Sosial Kota Surabaya: Studi tentang Nilai-Nilai Publik Program Campus Social Responsibility Kota Surabaya*, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Airlangga, 2018.
- [12] Putri, P. A., *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KOTA JAMBI*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, 2023
- [13] Verschuere B, Brandsen T dan Pestoff V, "Co-production: The state of the art in research and the future agenda," *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, vol. 23, no. 4, pp. 1083-1101, 2012.
- [14] Bryson JM, Crosby BC dan Stone MM, "The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature," *Public Administration Review*, vol. 66, no. s1, pp. 44-55, 2006.
- [15] Sugandi, Interviewee, Fungsi dan Wewenang Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Sleman. [Interview]. 22 November 2023.
- [16] Putnam RD, "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life," *The American Prospect*, no. 13, pp. 35-42, 1993.
- [17] Moore H, *Creating public value: Strategic management in government*, Harvard University Press, 1995.
- [18] Alkhudri S, "PPSDM Kemendagri Bukittinggi," 1 November 2021. [Online]. Available: <https://ppsdmbukittinggi.kemendagri.go.id/home/index.php/karya-tulis/item/100-nilai-publik>. [diakses 4 Agustus 2023].
- [19] Jørgensen B dan Rutgers MR, "Public Values: Core or Confusion? Introduction to the Centrality and Puzzlement of Public Values Research," *The American Review of Public Administration*, vol. 45, no. 1, pp. 3-12, 2014.
- [20] Bennington J, "From Private Choice to Public Value?," in *Public Value*, Springer Press, 2011, pp. 31-51.